



Rapat
Forum *Multi Stakeholder Group*
(MSG)
Pelaksanaan Transparansi Pendapatan
dari Industri Ekstraktif Indonesia

Bogor, 9-10 November 2021

Agenda

Usulan Roadmap Pengarusutamaan EITI

Perkembangan Penyusunan Laporan EITI Indonesia ke-9

Paparan Hasil Studi Keterbukaan Kontrak di Indonesia



Usulan Roadmap Pengarusutamaan EITI

Tujuan Pengarusutamaan EITI :

1. mendorong keterbukaan data yang sistematis, tersedia bagi publik, berasal dari sumber yang valid, yang bermanfaat untuk mendukung pembangunan negara
2. mengacu pada standar transparansi global dan disepakati oleh Forum Multi Stakeholder Group.

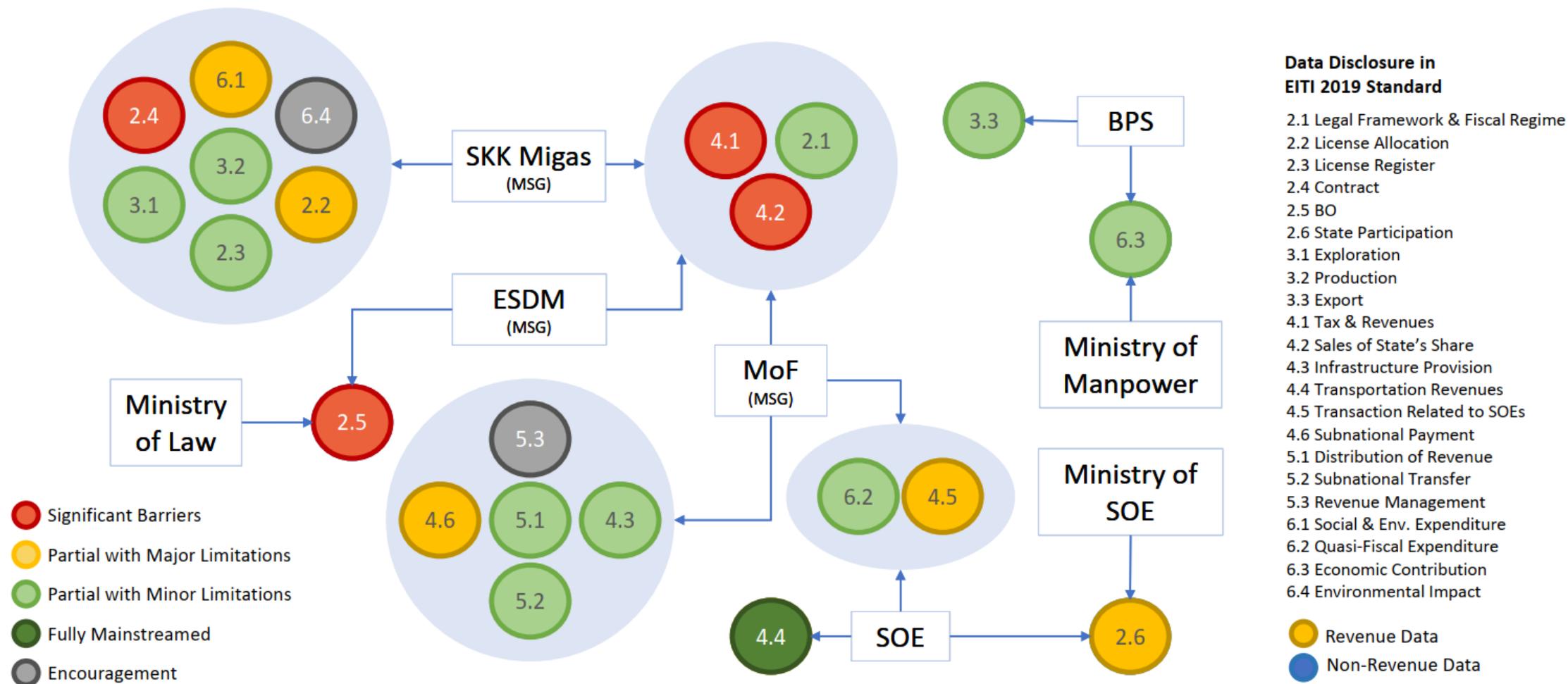
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan :

1. Persyaratan/Standar EITI 2019
2. Produsen data/ Stakeholder
3. Rekomendasi perbaikan menuju pelaksanaan Standar EITI
4. Aktifitas pengarusutamaan

Peta Requirement EITI, Stakeholder, & Hasil Assessment EITI Indonesia

Stakeholders – Government-Side Data Providers

Type Result



Partially mainstreamed with minor limitations

EITI Requirement/ Rekomendasi	Stakeholder	Aktifitas Pengarusutamaan	2021	2022				2023	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Phase II : Low Hanging Fruit									
Requirement 2.3 : License Register (Daftar Lisensi Lelang Wilayah)									
Menambahkan atribut <i>date of submission</i> pada perijinan saat ini	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba)	Data perusahaan yang mensubmit dokumen lelang ditampilkan pada web e lelang pada setiap tahapan lelang							
Requirement 3.2. : Produksi									
Mempublikasikan data <i>value of production</i> pada tiap komoditas	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba)	<ul style="list-style-type: none"> Produksi minerba dapat mempublikasikan volume nasional per provinsi Produksi migas dapat mempublikasikan volume nasional hingga per-perusahaan 							
Requirement 3.3 : Ekspor									
Menyediakan daftar data dari seluruh HS Code untuk komoditas sektor industri ekstraktif	BPS	Ekspor per KODE HS (8 digit) dapat dipublikasikan dalam open format data							
Requirement 5.2 : Subnational Transfer (Dana Bagi Hasil)									
Membuka variabel yang digunakan dalam perhitungan formula (nilai penerimaan negara yang dibagikan ke tiap daerah, over/under transfer untuk tahun pajak sebelumnya per daerah)	Kemenkeu	<ul style="list-style-type: none"> DBH Per provinsi Per Kab/kota dalam open format data Menampilkan variabel perhitungan dana bagi hasil tersedia berdasarkan regulasi yang berlaku 							
Requirement 6.2 : Quasi Fiscal Expenditures									
<ul style="list-style-type: none"> Mempublikasikan perhitungan DMO Batubara dan Biaya DMO Minyak, untuk menghitung pengeluaran kuasi-fiskal. Kesepakatan definisi dari pengeluaran kuasi fiskal untuk mempublikasikan realisasi pembayaran DMO yang dianggap sebagai pengeluaran kuasi fiskal. 	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba), BUMN	Harga Batubara Acuan dengan Harga Jual Batubara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 per metric ton FOB Vessel dengan acuan kalori 6.322 kcal/kg GAR. Total Moisture 8%, Total Sulphur 0.8%, dan Ash 15%							
		Data DMO Batubara secara Nasional (hingga Per jenis industri)							
		Data harga ICP dari PT. Pertamina (2019-2020 dan tahun selanjutnya (USD\$) dan volume dan selisih harga antara ICP dengan harga DMO Minyak (berdasarkan kontrak) dan volume yang ditetapkan harga tersebut							
Requirement 6.3 : Kontribusi pada Ekonomi									
<ul style="list-style-type: none"> Mempublikasikan estimasi dari aktivitas sektor informal Memasukkan detail gender dan mempublikasikan ke dalam laporan Publikasi data produksi daerah penghasil utama Publikasi data statistik perdagangan luar negeri BPS untuk melihat kontribusi ekonomi daerah penghasil terhadap ekspor komoditas nasional 	BPS & KESDM , Kemenkeu	<ul style="list-style-type: none"> Menyajikan data tenaga kerja TKA/TKI di industry ekstraktif Menyajikan data PDRB Menyajikan data produksi daerah penghasil utama 							

EITI Requirement/ Rekomendasi	Stakeholder	Aktifitas Pengarusutamaan	2021	2022				2023	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Phase I : Strategic Issues									
Requirement 2.6 : State Participations (Partisipasi BUMN)									
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Kementerian BUMN untuk menampilkan ringkasan deskripsi hubungan keuangan antara BUMN/pemerintah pada situs web. Mendorong BUMN untuk bergabung dengan jaringan transparansi BUMN EITI, untuk terlibat dengan BUMN ekstraktif lainnya di negara-negara pelaksana EITI 	Kementerian BUMN, BUMN	Menggunakan data Annual Report dari perusahaan BUMN, sedangkan untuk sinergi sistem aplikasi dari kementerian BUMN akan dilakukan Technical Meeting lebih lanjut							
Requirement 4.5 :Transaction Related to State Owned Enterprises									
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong BUMN untuk meningkatkan pengungkapan data keuangan dengan format excel/csv yang dapat diunduh dan rincian yang diperlukan dari anak perusahaan dan usaha patungan BUMN. Informasi yang diperlukan dari anak perusahaan dapat dicantumkan dalam AFS konsolidasi BUMN dan atau catatan tersendiri yang disiapkan oleh BUMN yang dipublikasikan melalui website Laporan Tahunan. 	Kementerian BUMN, BUMN	Menggunakan data Annual Report dari perusahaan BUMN.							

Partially mainstreamed with major limitations

EITI Requirement/ Rekomendasi	Stakeholder	Aktifitas Pengarusutamaan	2021	2022				2023	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Phase I : Other									
Requirement 2.2 : License Allocation									
<ul style="list-style-type: none"> Mengatur tampilan website untuk data proses pemberian perijinan industri ekstraktif sesuai dengan proses, kriteria teknis dan finansial, proses lelang, peserta lelang, dan pemenang lelang Mempublikasikan keterangan yang lebih detail tentang syarat teknis dan finansial dalam pemberian ijin industri ekstraktif 	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba)	<ul style="list-style-type: none"> Menampilkan proses , kriteria teknis dan finansial bagi peserta lelang dan tahap lelang pada web e-lelang Menampilkan daftar perusahaan peserta dan pemenang lelang untuk sektor minerba pada web e lelang minerba 							
Requirement 6.1 : Social and Environmental Expenditures									
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sistem pelaporan perusahaan yang ada untuk menangkap rincian yang diperlukan untuk pengeluaran sosial dan lingkungan seperti yang dipersyaratkan oleh Standar, sebagai berikut: jenis dan sifat pengeluaran (CSR), rincian bentuk pengeluaran (tunai atau in-kind) , dan penerima manfaat sebenarnya secara spesifik (pemerintah/LSM/sekolah, dsb.) 	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba)	Sektor Minerba : <ul style="list-style-type: none"> Menampilkan data realisasi PPM (tahunan/triwulan) per komoditas (minerba secara total) ,dengan menampilkan per 8 aspek biaya. Menampilkan data penerima manfaat PPM per ring I -II (radius terdekat dari kegiatan pertambangan) Menampilkan informasi penerima manfaat dari beberapa perwakilan perusahaan 							
		Sektor Migas : <ul style="list-style-type: none"> Menampilkan data realisasi PPM (tahunan) per komoditas (migas secara total), dengan menampilkan per 7 aspek program yang ditampilkan dalam sustainability report Menampilkan informasi penerima manfaat dari beberapa perwakilan perusahaan 							

Partially mainstreamed with major limitations

EITI Requirement/ Rekomendasi	Stakeholder	Aktifitas Pengarusutamaan	2021	2022				2023	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Phase II : Strategic Issues				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Requirement 6.4 : Dampak Lingkungan									
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong KESDM untuk membuat daftar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disetujui dan dapat diakses publik secara terpusat. SKK Migas harus menjaga keteraturan penerbitan laporan keberlanjutan setiap tahun sebagai media untuk mengungkapkan dampak lingkungan dari industri Migas. Mendorong KESDM untuk menjaga keteraturan penerbitan laporan kinerja setiap tahun sebagai media untuk mengungkapkan dampak lingkungan dari industri Batubara & Pertambangan. KESDM juga dapat meningkatkan kelengkapan dan keteraturan pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Manajemen Lingkungan 	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba & KLHK)	Mempublikasikan jumlah perusahaan Migas dan Minerba yang sudah mendapatkan izin persyaratan untuk AMDAL							
Requirement 4.6 : Subnational Payments									
<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Kemenkeu untuk meningkatkan bagan akun standar bagi pemerintah daerah untuk memasukkan rincian yang diperlukan untuk pembayaran daerah seperti yang disyaratkan oleh Standar EITI. Mendorong Ditjen Perimbangan Keuangan untuk mengungkapkan data pembayaran subnasional dengan rincian yang diperlukan seperti yang dipersyaratkan oleh Standar EITI atas nama pemerintah daerah. Mendorong KESDM dan SKK Migas untuk memasukkan rincian pembayaran subnasional pada mekanisme pelaporan perusahaan mereka. Mendorong perusahaan untuk mengungkapkan pembayaran subnasional secara sepihak. 	Kemenkeu	Data APBD per kabupaten/kota							

Significant barriers / significant legal and administrative limitations

EITI Requirement/ Rekomendasi	Stakeholder	Aktifitas Pengarusutamaan	2021	2022				2023	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Phase II : Strategic Issues									
Requirement 2.4 : Kontrak									
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan dukungan/landasan hukum terkait kewajiban pembukaan kontrak untuk kegiatan industri ekstraktif yang dimulai per 1 Januari 2021 Penelahan kontrak yang akan dipublikasikan 	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan mitigasi risiko dengan cara pembahasan pasal-pasal dalam kontrak, untuk melakukan uji Konsekuensi sebagai upaya keterbukaan 							
Requirement 2.5 : Beneficial Ownership									
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan prosedur verifikasi data BO secara tahunan Membuat register BO dapat diakses publik dengan format open data 	KESDM (SKK MIGAS/Ditjen Migas & Ditjen Minerba), Kemenkumham	<ul style="list-style-type: none"> Teknikal Assistance pada Program Open Extractive untuk verifikasi data BO untuk meningkatkan kualitas data. Meningkatkan berbagi-pakai data antar K/L di dalam satu sistem aplikasi AHU 							
Requirement 4.1 : Taxes and Revenues									
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem otorisasi perusahaan khusus untuk ijin pengungkapan sistematis yang akan digunakan sebagai dasar Ditjen Perbendaharaan atau Ditjen Pajak untuk mengungkapkan data pajak per perusahaan/proyek. Mengungkapkan data penerimaan pajak dan bukan pajak per perusahaan/proyek dari sistem pengumpulan data pemerintah yang ada 	KESDM (SKK MIGAS & Ditjen Minerba), Kemenkeu	<ul style="list-style-type: none"> Data Pajak dapat disajikan berdasarkan Kode Lapangan Usaha (KLU) Menyajikan Data PNBPN Migas nasional Menyajikan Data PNBPN Minerba hingga tingkat provinsi 							
Phase II : Other									
Requirement 4.2 : Sale of The State's Share of Production									
<ul style="list-style-type: none"> Mengungkapkan volume dan nilai penjualan in-kind bahan minyak dan gas yang dipilah menurut masing-masing perusahaan pembeli, termasuk: volume yang diterima dan dijual oleh negara, pendapatan yang diterima dari penjualan, dan penerimaan yang ditransfer ke negara dari hasil minyak, gas, yang dijual Meningkatkan sistem administrasi agar mudah mencocokkan nomor bill of loading dengan pembeli individu untuk memudahkan pengungkapan tingkat pemilahan yang diperlukan. Mengungkapkan penerimaan terpilah untuk government lifting, yaitu perhitungan FTP, DMO dan ekuitas minyak. 	KESDM (SKK MIGAS)	Data disajikan berupa entitlement pemerintah yang disaggregasi sampai First Tranche Petroleum (FTP) , DMO, equity oil secara nasional (value USD\$)							

Beberapa Pending Isu Mainstreaming

1. Mempublikasikan ketersediaan peraturan di daerah terkait industri ekstraktif terutama pasca terbitnya UU No. 3/2020
2. Konfirmasi publikasi data pajak per perusahaan, saat ini tersedia perusahaan sudah mengirimkan data ke sekretariat eiti dengan lembar otoritas sehingga sejak tahun tahun 2010, data sudah tersajikan pada laporan EITI
3. Konfirmasi keterbukaan data Penerimaan Negara Sektor Migas per provinsi/per K3S
4. Ketersediaan dan keterbukaan ekspor migas dan minerba per perusahaan
5. Kesepakatan definisi dari pengeluaran kuasi fiskal untuk mempublikasikan realisasi pembayaran DMO yang dianggap sebagai pengeluaran kuasi fiskal.
6. Mempertimbangkan pengungkapan data keuangan, produksi, ekspor, dan peran serta BUMN pada tingkat anak perusahaan dalam format open data.
7. Melibatkan KLHK untuk mengidentifikasi ketersediaan data Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dapat diakses Publik
8. Pengarusutamaan data publikasi dalam bentuk Annual Report (pdf) dan sinergitas pada aplikasi pelaporan agar terciptanya SATU DATA

Perkembangan Penyusunan Laporan EITI Indonesia ke-9

Progres Report Laporan ke 9 tahun 2021 (mencakup data tahun 2019-2020)

Bab/Requirement EITI	Ruang Lingkup
Bab I Pendahuluan	<p>•Latar Belakang, Tujuan Laporan Konstektual, Ruang Lingkup, Metodologi Proses Pelaporan</p>
<p>Bab II Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif dan Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif <i>(req. Legal Framework and Fiscal Regime)</i></p>	<p>Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dari instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba), dan data Kementerian /Lembaga yang terkait</p>
<p>Bab III Implementasi Kegiatan Industri Ekstraktif <i>(req. License Allocation; License Registers; Ekplorasi; Production; Export;)</i></p>	<p>Kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif sektor minyak dan gas bumi dan sektor mineral batubara. Mencakup proses perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor industri ekstraktif, commodity trading.</p>
<p>Bab IV Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara <i>(req. Taxes and Revenues; Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind; Transactions related to state-owned enterprises (SOEs); Subnational transfers)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi Realisasi Pendapatan Negara • Penerimaan Perpajakan • Penerimaan Bukan Pajak • Alokasi Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif • Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat • Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
<p>Bab V Peran Badan Usaha Milik Negara <i>(req. State participation; Transactions related to state-owned enterprises (SOEs); Quasi-fiscal expenditures)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif • Holding BUMN • Quasi-fiscal Industri Ekstraktif

Progres Report Laporan ke 9 tahun 2021 (mencakup data tahun 2019-2020)

Bab/Requirement EITI	Ruang Lingkup
Bab VI Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>(req Social and environmental expenditures ; Environmental impact)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan.• Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, ASR, biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi jaminan reklamasi.
Bab VII Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional <i>(req. Contribution to The Economy)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-1• Dampak Terhadap Masyarakat Adat• Tenaga Kerja Yang Mencakup Informasi Gender.
Bab VIII Kebijakan di Industri Ekstraktif <i>(req. Beneficial Ownership;Contract)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Perkembangan integrasi teknologi informasi• Kebijakan sesuai value chain• Disclosure contract• Beneficial ownership

Progres Report Laporan ke 9 tahun 2021

- **Progress penyusunan 60%**
- **Kebutuhan Data antara lain :**
 1. Daftar pengalihan Participant Interest Tahun 2020
 2. Data PPh badan sektor migas dan minerba
 3. Data PPN sektor migas dan minerba
 4. Data PDRD Mineral Logam dan Batubara
 5. Data Deviden Mineral dan Batubara
 6. Data ekspor impor PT Pertamina terkait commodity trading
 7. Laporan tahunan 2020 dari PT. Freeport Indonesia
 8. Laporan (Sustainability Report) SKK Migas tahun 2020 terkait tanggung jawab sosial
 9. Analisa Dampak Masyarakat Adat
 10. Tenaga kerja per Gender untuk IUJP sektor Minerba
 11. Kesepakatan Level Data Penerima Manfaat/Beneficial ownership yang dapat dipublikasikan apakah sebatas pemilik saham atau penerima akhir